



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

# PRESS CABLE

NOMOR : 008/14012009  
HARI : RABU  
TANGGAL : 14 JANUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
<b>I.</b>	<b>INTERNASIONAL</b>	
	Israel Lakukan Kejahatan Kemanusiaan	3
	Korban Serangan Israel Hampir Seribu Jiwa	4
	UN invites Suciwati for briefing on Munir case	4
	Israel Serang Pinggir Kota PBB Kutuk Pelanggaran HAM Israel	5
	TKI dalam Konflik Palestina Umi Saodah Mengungsi ke Gaza Barat	6
	Pertemuan HAM Internasional Bahas Kasus Munir	6
	Indonesia-Suriah Ketenagakerjaan Menjadi Agenda Utama	7
<b>II.</b>	<b>NASIONAL</b>	
	<b>A. POLITIK</b>	
	President wants immediate Constitutional amendment	7
	<b>B. EKONOMI</b>	
	Pemerintah Tambah Stimulus Fiskal Pada APBN 2009	8
	Al Jazair Tawarkan Proyek Konstruksi	9
	Presiden Minta Pengusaha Turunkan Harga	9
	Kreditor Luaskan RI Atur Proyek	11
	<b>C. SOSBUD</b>	

		Indonesia seeks Australian help in ferry probe: official	12
		Pemerintah Usahakan Pemulangan Umi Saodah dari Gaza	13
		Pembantu Asal Indonesia Bunuh Diri di Yordania	13
		Disnakertrans Petakan PHK TKI	14
		Universitas Rusia Tandatangani Kerjasama dengan Universitas Indonesia	14
		Tampar Pekerja Indonesia, Wanita Hong Kong Didenda Rp 4,3 Juta	15
	<b>D.</b>	<b>HANKAM</b>	
		Pergantian Dua Pesawat Tempur Tunggu Depkeu	15
		Pemotongan Anggaran Pertahanan Berpotensi Membahayakan Negara	16
	<b>E.</b>	<b>HUKUM</b>	
		Pemerintah Siapkan Tiga Opsi	16
	<b>F.</b>	<b>OLAHRAGA: Tidak Ada</b>	
	<b>G.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP: Tidak Ada</b>	
	<b>III.</b>	<b>ARTIKEL</b>	
		BHP dan Kapitalisme Global	17
		Prospek Perekonomian Indonesia 2009 Oleh Fahrudin Salim	17
		Barat dan Dunia Islam Perlu Tekan Israel	19
	<b>IV.</b>	<b>LAIN-LAIN: Tidak Ada</b>	
	<b>V.</b>	<b>EDITORIAL</b>	
		Memperbaiki Sistem Akuntansi dan Sistem Hukum	20

Jakarta, 8 Januari 2009  
Sub Direktorat Berita  
Direktorat Informasi dan Media

## I. INTERNASIONAL :

### 1. Israel Lakukan Kejahatan Kemanusiaan

Serangan militer Israel ke Jalur Gaza tidak proporsional dan melanggar hukum internasional, kata seorang pemimpin Uni Eropa kemarin (13/1). Komisioner Bantuan Kemanusiaan Uni Eropa Louis Michel menilai respons negara Yahudi itu terhadap serangan roket Hamas sangat berlebihan sehingga menimbulkan banyak korban jiwa.

"Satu fakta sederhana, yang diakui oleh para ahli di lapangan, bahwa Israel tidak menghormati hukum internasional," kata Michel seperti dikutip surat kabar Belgia, La Libre Belgique kemarin. Menurut dia, kewajiban pertama pasukan pendudukan untuk menjaga keselamatan penduduk, melindungi mereka, dan merawat mereka, tidak dilakukan oleh Israel.

Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan menyebut aksi militer Israel merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. "Ada orang-orang yang terganggu oleh pernyataan saya tentang kekecewaan terhadap pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak. Jika kita tidak menyampaikan apa yang adil dan sesuai hukum, maka kita akan kehilangan harga diri," kata dia.

Rakyat Turki semakin vokal menentang agresi Israel ke Gaza. Ratusan ribu warga Turki melakukan protes terhadap penyerangan Gaza yang memasuki hari ke-18 dan menewaskan 925 orang dan melukai 4.250 orang. Separuh dari korban tewas adalah warga sipil, kebanyakan perempuan dan anak-anak.

Di pihak Israel, 13 orang tewas, tiga di antaranya warga sipil dan 10 tentara. Israel mencegah jurnalis asing memasuki Gaza sehingga jumlah korban yang sebenarnya sulit diperoleh.

Kemarin, Israel tampak semakin dalam memasuki wilayah Gaza sejalan dengan rencana operasi militer tahap tiga. Israel mulai beranjak ke wilayah pinggiran bagian selatan dan timur kota Gaza, didukung oleh artileri lengkap dan helikopter. Sementara wilayah barat Gaza digempur dengan tembakan meriam dari kapal perang Israel.

Perdana Menteri Israel Ehud Olmert mengatakan serangan akan terus dilanjutkan hingga persenjataan Hamas terlucuti. "Kami akan mengakhiri operasi ketika dua persyaratan yang kami inginkan terpenuhi: mengakhiri tembakan roket dan menghentikan persenjataan Hamas. Jika dua kondisi ini ada, kami akan mengakhiri operasi di Gaza," kata Olmert dari kota Ashkelon, Israel.

Pemimpin senior Hamas justru mengatakan kelompoknya sudah mendekati kemenangan. Hamas juga gencar membalas serangan Israel dengan tembakan roket sekitar 15 kali setiap hari. "Setelah 17 hari perang bodoh ini, Gaza tidak pecah dan tidak akan jatuh," ujarnya dalam siaran televisi dari sebuah lokasi rahasia di Gaza malam sebelumnya.

Bombardir udara sudah gencar berlangsung sejak kemarin pagi. Al Jazeera melaporkan perang besar antara Israel dan pejuang Palestina terjadi di Tal al-Hawa, sebelah selatan kota Gaza. Bentrokan juga terjadi di wilayah utara, Beit Lahiya, dan area timur Khan Younis. Pasukan cadangan Israel dikerahkan penuh untuk membantu pasukan reguler.

Israel kemarin mendapat serangan dari wilayah Yordania, setelah sebelumnya mendapat serangan dari Libanon. Militer Israel menyatakan prajuritnya yang berada di perbatasan Yordania ditembaki, tapi tidak ada korban. Yordania, yang meneken perjanjian damai dengan Israel pada 1994, membantah adanya penembakan.

Tampak frustrasi dengan situasi Gaza dan tak diindahkannya resolusi Dewan Keamanan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon kembali meminta agar perang segera dihentikan. Ban mengatakan perang ini telah menewaskan terlalu banyak orang,

menyengsarakan banyak warga sipil, dan menghancurkan pondasi masyarakat, seperti rumah, infrastruktur, fasilitas kesehatan publik dan sekolah.

"Pesanku sederhana dan langsung: perang ini harus berhenti. Untuk kedua pihak, saya katakan: berhenti sekarang," kata Ban dalam konferensi pers di New York menjelang keberangkatannya ke Timur Tengah kemarin.

"Terlalu banyak orang yang mati. Terlalu banyak rakyat sipil yang menderita. Terlalu banyak warga Israel dan Palestina hidup dalam ketakutan."

Dalam kunjungannya ke Timur Tengah, Ban akan bertemu sejumlah perwakilan dari Hamas dan menemui pejabat senior Mesir dan Yordania hari ini (14/1). Ban juga berencana bertolak ke Israel, wilayah Tepi Barat Palestina, Turki, Libanon, Suriah dan Kuwait, di mana Liga Arab akan mengadakan sidang khusus membahas penanganan konflik Gaza.

"Tujuanku adalah memperbesar langkah usaha diplomatik bersama dan menjamin bantuan kemanusiaan yang sangat mendesak bisa menjangkau orang-orang yang membutuhkan," katanya. (Jurnal Nasional)

## **2. Korban Serangan Israel Hampir Seribu Jiwa**

Sumber-sumber medis Palestina mengemukakan pada Selasa (13/1) atau hari ke-18 serangan Israel, 70 orang tewas sehingga jumlah total korban tewas 975 jiwa warga Palestina ditambah 4.400 lainnya cedera.

"Ini adalah hari ke-18 serbuan Israel terhadap rakyat kita, dan semakin hari semakin ganas seiring jumlah korban yang bertambah banyak," kata Presiden Palestina Mahmud Abbas. "Israel terus melakukan serbuan ini untuk menghilangkan rakyat kita di sana," kata Abbas dari markasnya di Tepi Barat.

Pasukan khusus Israel didukung tank dan serangan udara makin jauh masuk ke Kota Gaza hingga tinggal beberapa ratus meter dari kawasan-kawasan pemukiman di selatan, kata para saksi.

Penduduk mengatakan terjadi tembak menembak yang sengit di kawasan pemukiman Zeitun dan penampungan pengungsi Jabaliya di pinggiran Gaza. Israel juga menjatuhkan gelombang serangan bom di kota perbatasan Rafah sehingga ratusan orang berlarian ke jalan.

"Terjadi serangan udara yang terus menerus di sepanjang perbatasan Mesir -- sekitar 60 keluarga telah meninggalkan rumah mereka yang terletak beberapa ratus meter dari perbatasan," kata Harb, warga Palestina yang bekerja untk badan bantuan internasional CARE.

Kantor kemanusiaan PBB UNOCHA mengemukakan pihaknya tidak dapat memastikan jumlah warga yang sudah mengungsi dari rumah mereka. Namun, UNOCHA menyatakan lebih dari 35 ribu orang pada hari Senin telah masuk ke penampungan-penampungan. Jumlah itu berarti peningkatan 7.400 pengungsi dari 24 jam sebelumnya.

Komandan militer Israel mengatakan bahwa Operasi Cast Lead telah menghasilkan kemajuan. Namun, dia mengatakan pasukan Israel menghadapi kondisi "serba sulit" di Kota Gaza. Mereka tidak punya pengalaman tempur di kota berpenduduk setengah juta warga Palestina itu.

Delegasi Hamas saat ini berada di Kairo untuk membahas usulan mengakhiri pertempuran. Usulan itu disusun Presiden Mesir Hosni Mubarak dan didukung negara-negara barat.

Tokoh senior Hamas Mussa Abu Marzuk mengakui pihaknya punya "pandangan yang kokoh" atas prakarsa itu namun juga mengatakan "masih ada harapan" mereka mau menerima usulan itu. (Media Indonesia)

## **3. UN invites Suciwati for briefing on Munir case**

The UN Human Rights Council has invited Suciwati, wife of the late human rights activists Munir Said Thalib, for a meeting to discuss the latest developments in his murder case.

Vice coordinator of the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) Indria Fernida confirmed the invitation, saying that it reflected how relevant Munir's murder was to the global effort to protect human rights.

Indira said the invitation came from Margaret Sekaggya, a special rapporteur to the UN Human Rights Council.

"Margaret will make clarifications on the murder case and then file an official report based on those," Indira said.

The meeting, she said, was scheduled to be held in Bangkok from Jan. 18 until Jan. 20. Suciwati will be accompanied by officials from Kontras, the Human Rights Working Group (HRWG) and Imparsial.

So far, the justice system has found former Garuda Indonesia pilot Pollycarpus Budihari Priyanto guilty of direct involvement in poisoning Munir with arsenic in his flight to Amsterdam in September 2004. Pollycarpus was sentenced to 20 years in prison.

On Dec. 31 the South Jakarta District Court acquitted the alleged mastermind of the murder, former top intelligence agency executive Muchdi Purwopranjono, from all charges due to a lack of proof.

After meeting Sekaggya, Suciwati is scheduled to meet the special rapporteur on Extrajudicial Summary or Arbitrary Executions, and special rapporteur on Judicial Independence and the council's working group on forceful disappearance.

HRWG coordinator Raffendy Jamin said completing the four stages of queries would mean that the next UN Human Rights Assembly in March would schedule a topic on Munir's murder as a meeting agenda.

"The assembly meeting would produce questions that must be answered by Indonesia's Foreign Ministry," Raffendy said. (The Jakarta Post)

#### **4. Israel Serang Pinggir Kota, PBB Kutuk Pelanggaran HAM Israel**

Pasukan Israel mulai masuk ke pinggir kota untuk pertama kalinya, Selasa (13/1) pagi. Sementara di Jenewa, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengutuk keras pelanggaran Israel, Senin (12/1) atau Selasa waktu Indonesia. Di Mesir, inisiatif dialog berjalan lambat namun mencapai beberapa kemajuan.

Selasa hari ini, suara pertempuran sudah terdengar menjelang subuh di kota berpenduduk 400.000 orang, Tel Hawwa. Pasukan Israel didukung artileri dan helikopter tempur bergerak menuju kawasan penduduk di timur dan selatan Kota Gaza. Kapal perang Israel menembaki pesisir dari Barat.

Seorang warga Palestina mengatakan tank-tank Israel bergerak ke permukiman penduduk di Tel Hawwa. Puluhan ribu warga Palestina tinggal di apartemen-apartemen di selatan Kota Gaza itu. Salah seorang warga, Khader Mussa (35), kepada AP via telepon mengatakan, dia melihat dua apartemen terbakar. Dia kini berlindung di ruang bawah gedung apartemennya bersama 25 orang yang lain, termasuk istrinya yang tengah hamil dan kedua orang tuanya. "Pintu neraka sudah dibuka," katanya "Tuhan bantu kami."

Beberapa gedung telah terbakar, kata para saksi termasuk sebuah tempat perkayuan. Asap tebal menyelimuti wilayah itu. Militer Israel mengonfirmasi pertempuran meningkat, namun tidak memberikan detail.

Hingga hari ke-18, jumlah warga Palestina yang menjadi korban mencapai lebih dari 900 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak. Sementara itu, korban luka-luka mencapai 4.100 orang. Dari pihak Israel dikabarkan 13 tewas, tiga di antaranya warga sipil. Sebanyak 250.000 orang meninggalkan rumahnya, namun tidak dapat mengungsi karena perbatasan ditutup.

#### **Mengutuk Keras**

Sebuah resolusi yang mengutuk keras serangan militer Israel di Gaza dikeluarkan Dewan HAM PBB di Jenewa, Senin. Resolusi tidak mengikat tersebut menyatakan operasi Israel melanggar HAM rakyat Palestina. Indonesia turut menyusun resolusi bersama negara-negara Arab, Asia, dan Afrika lainnya. Resolusi disahkan melalui voting atau pemungutan suara, dengan hasil 33 suara mendukung, termasuk Indonesia, dan 13 negara-negara Eropa memilih abstain, sementara Kanada menolak.

Selain mengutuk keras Israel, resolusi juga mendesak Israel segera menghentikan serangan militernya di seluruh wilayah pendudukan Palestina yang mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran berat HAM terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza, serta penghentian serangan roket. Resolusi juga mendesak agar rakyat Palestina diberi perlindungan internasional sesuai dengan hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional.

Perdana Menteri Ehud Olmert mengatakan, operasi militer Israel akan dihentikan jika sayap militer Hamas menghentikan serangan roket. "Kami ingin mengakhiri operasi dengan dua syarat, akhiri tembakan roket dan berhenti mempersenjatai Hamas," katanya di Kota Ashkelon, Senin.

"Yang lain akan bertemu dengan 'tinju besi' rakyat Israel," tambah Olmert. Militer Israel mengatakan Hamas menembakkan 20 roket ke Israel, Senin. Sebuah roket menghantam Ashkelon, tapi tidak ada korban.

Sementara itu, Perdana Menteri Gaza Ismail Haniyeh menyatakan, pasukan Israel harus ditarik mundur dari Gaza dan blokade perbatasan harus dibuka agar gencatan senjata bisa terlaksana. Berbicara di stasiun televisi Al Aqsa, Haniyeh yang tidak diketahui tempat persembunyiannya mengatakan, "Insya Allah, kita hampir menang."

Pesawat Israel menembaki posisi-posisi yang diduga menjadi posisi-posisi Hamas di Kota Gaza. Kapal perangnya menembakkan sedikitnya 25 peluru. Sekitar 20 warga Palestina tewas, Senin. Beberapa di antaranya akibat luka-luka di hari sebelumnya. Seorang anak perempuan, seorang dokter, dan seorang militan Hamas tewas di utara Jalur Gaza, kata Kepala Rumah Sakit Kamal Adwan.

Israel telah mengirim pasukan cadangan ke Gaza untuk membantu ribuan tentara yang telah masuk sebelumnya. Pertempuran terus berlangsung meski Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang mendesak dilakukannya gencatan senjata. Upaya Mesir untuk menengahi pihak-pihak yang bertikai di Jalur Gaza ditunggu berbagai kalangan internasional. Duta Besar Turki untuk Indonesia Aydin Avirgen saat dijumpai SH dalam sebuah acara, Senin, menyatakan negaranya juga menghubungi berbagai pihak terkait untuk mengupayakan agar pertumpahan darah di Gaza dapat segera dihentikan. (ap/aljazeera/nat) (Sinar Harapan)

## **5. TKI dalam Konflik Palestina, Umi Saodah Mengungsi ke Gaza Barat**

Umi Saodah, tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terjebak di Jalur Gaza kini tengah mengungsi bersama warga Palestina lainnya di Gaza Barat.

"Berdasarkan informasi KBRI Kairo, Umi diperkirakan telah berada di Gaza Barat bersama warga Palestina lainnya," kata Teguh Wardoyo, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia, Departemen Luar Negeri, Senin (12/1) malam. Selanjutnya Umi akan dibawa keluar lewat Rafah melalui Mesir. Namun untuk melakukan hal tersebut, harus menunggu situasi aman, serta izin keluar dari Palestina.

Ayah dan paman Umi telah menemui Teguh di Deplu, Senin pagi, guna memohon bantuan pemulangan Umi secepatnya. "Saya berharap mendapat kabar baik sebelum pulang ke Semarang," kata Hanafi (43) paman Umi.

Muhyosmin (53), ayah Umi, dalam bahasa Jawa mengatakan putrinya berangkat ke Timur Tengah sejak tahun 2000. "Tadinya kami sekeluarga mengira dia diberangkatkan ke Arab Saudi," kata Muhyomin, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Hanafi. Enam bulan kemudian mereka menerima surat bahwa Umi berada di Palestina.

"Keluarga senang sekaligus khawatir karena tahu situasi Palestina," kata Hanafi. (Sinar Harapan)

## **6. Pertemuan HAM Internasional Bahas Kasus Munir**

Kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir akan dibahas di forum pertemuan Pelapor Khusus PBB tentang Pembela HAM yang akan digelar di Margaret Sekaggya, Bangkok, 18-20 Januari nanti.

Istri mendiang Munir, Suciwati akan menghadiri pertemuan tersebut untuk menjelaskan kepada internasional terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Purwopranjono sebagai terdakwa pembunuh Munir.

Tim legal Komite Aksi Solidarita untuk Munir (Kasum) Chairul Anam mengatakan, kasus Munir telah mendapat atensi khusus dari PBB. Saat PN Jakarta Selatan membebaskan Muchdi, kata dia, PBB menanyakan latar belakang putusan tersebut. Menurut Anam, PBB mempertanyakan apakah proses hukum terhadap Muchdi lewat peradilan yang independen dan imparial, termasuk upaya kepolisian dan kejaksaan untuk mengungkap alat bukti yang meyakinkan majelis hakim.

Anam menyatakan, kasus Munir membutuhkan atensi khusus dari internasional karena dapat menjadi presenden buruk bagi penegakan HAM di Indonesia. Dia menilai, respons PBB yang begitu besar terhadap kasus Munir membuka peluang untuk memperkarakan lewat mekanisme internasional.

"Peluang untuk menginternasionalkan kasus ini sangat besar. Bahkan kalau pengadilan di Indonesia gagal menghadirkan keadilan bagi korban, maka bisa dibuka lewat mekanisme internasional. Banyak pilihan mekanismenya," katanya kepada Jurnal Nasional, kemarin (13/1).

Namun, lanjutnya, pihaknya tidak ingin kasus Munir diselesaikan secara internasional, namun cukup lewat mekanisme hukum di Indonesia. Namun, dia menyatakan, upaya melapor ke internasional, selain untuk mendapatkan keadilan bagi korban, juga untuk mendorong perubahan sistem hukum di Indonesia.

"Jadi, pertarungan kita adalah meminta dukungan internasional, untuk mendorong sistem peradilan kita agar lebih profesional, imparial. Kita ingin terbongkarnya kasus ini demi keadilan, dan perubahan sistem," katanya.

Kasum menilai, persoalan Munir sangat kontekstual dengan perhatian PBB tentang Pembela HAM di dunia. Praktik impunitas dalam kasus-kasus kekerasan terhadap para pembela HAM (human rights defender) selalu menjadi sorotan komunitas internasional.

Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB Urusan Situasi Pembela HAM, Hina Jilani pada 2006 dan 2007 lalu juga sempat bertemu Suciwati dan menyatakan kasus Munir selalu menjadi perhatian khususnya. (Jurnal Nasional)

## **7. Indonesia-Suriah, Ketenagakerjaan Menjadi Agenda Utama**

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Suriah Mohammad Naji Otri sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara.

"Ada potensi yang besar untuk peningkatan kerja sama ekonomi Suriah dan Indonesia. Oleh karena itu, komisi bersama harus lebih fokus untuk bekerja sama di bidang perdagangan, investasi, pertanian dan energi," kata Presiden Yudhoyono usai pertemuan bilateral dengan PM Suriah Otri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/1).

Terkait TKI di Suriah, Presiden Yudhoyono dan PM Otri telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah TKI ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan, Presiden Yudhoyono mengusulkan mandatory consuler notification apabila ada masalah yang berkaitan dengan tenaga kerja-tenaga kerja Indonesia di sana, agar Pemerintah Suriah maupun Pemerintah Indonesia bisa menyelesaikan dengan baik.

"Semangat itu kuat sekali, nanti Komisi Bersama akan mengagendakan langkah-langkah ke depan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu," katanya.

Menurut data BNP2TKI, jumlah TKI ilegal di Suriah berjumlah 70.000 orang, Presiden Yudhoyono menyatakan akan mengecek kebenaran data itu ke Dubes RI di Damaskus dan Menakertrans.

PM Otri meluruskan, jumlah TKI yang berada di Suriah, hanya sepersepuluh dari jumlah 70.000. "Ini adalah penegasan dari saya. Sudah ada rancangan persetujuan di bidang tenaga kerja yang akan segera dibahas dan ditandatangani dalam pertemuan komisi bersama antara Indonesia dan Suriah," katanya. (din) (Sinar Harapan)

I I .

**NASIONAL** :

**A. POLITIK** :

### **1. President wants immediate Constitutional amendment**

President Susilo Bambang Yudhoyono underlined Tuesday the importance of a fifth amendment to the Constitution, while speaking to hundreds of veterans.

Yudhoyono said, during the commemoration of the 52nd anniversary of the Indonesian Veterans Legion (LVRI) at the presidential palace that Indonesia needed to review the 1945 Constitution, which had been amended four times since 1999.

"Let's examine, have we headed in the right direction with the four amendments, as our founding fathers wanted? Has there been an effective balance in the sharing of power between the executive, legislative and judicial bodies?" the president said.

"Can the bodies do their job, as mandated by the Constitution, effectively? Have we had proper formula for liberty and security? And can the Constitution respond to changing times, to the era of globalization?" he went on.

Critics have said a fifth amendment is needed to reduce the excessive power of the legislature, which now has the power to conduct fit and proper tests in respect of executive jobs, including Ambassadors and even directors of state-owned enterprises.

Legislative power is also manifested when a bill passed by the House of Representatives will automatically become law within 30 days even if the President refuses to sign it.

The new amendment also aims at strengthening the role of the Regional Representative Council (DPD) to act as an upper house.

Yudhoyono said a fifth amendment to the Constitution was always possible, but could only be done if the people really wanted it.

Landmark achievements of the first four amendments, between 1999 and 2002, included limitation of presidential tenure to two five-year terms; termination of the military's political function; separation of the police from the military; election of DPD members; and the introduction of direct presidential elections.

The LVRI chairman, a three-star retired general Rais Abin, said a fifth Constitutional amendment was urgent to help Indonesia consistently implement its presidential system.

Rais said the four amendments had resulted in bringing about a parliamentary system, which "would not be as effective as" the presidential system in the Indonesian context.

"We believe a fifth amendment is the only thing that can help us solve the problem," he said.

Demands for the fifth Constitutional amendment have emerged during the last few years. (The Jakarta Post)

## **B. EKONOMI :**

### **1. Pemerintah Tambah Stimulus Fiskal Pada APBN 2009**

Pemerintah memutuskan untuk memberikan tambahan stimulus fiskal pada APBN 2009, agar memberikan penguatan pada sektor usaha dan masyarakat, sehingga memiliki daya tahan dalam menghadapi krisis keuangan global.

Pejabat Menko Perekonomian, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers yang berlangsung di Kantor Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/1) petang, menyatakan, stimulus fiskal yang semula sebesar Rp12,5 triliun akan ditambah Rp15 triliun.

"Pemberian stimulus fiskal yang sudah diberikan dalam UU APBN sebesar Rp12,5 triliun dan itu dialokasikan untuk memberikan subsidi dalam bentuk bea masuk maupun PPn yang ditanggung pemerintah," katanya usai Sidang Kabinet Paripurna.

Ia menjelaskan, tambahan stimulus fiskal yang akan dialokasikan dalam perubahan APBN 2009 sebesar Rp15 triliun.

"Ini termasuk memberikan diskon tarif listrik seperti dalam kebijakan yang disampaikan pemerintah kemarin (Senin, 12/1) dan juga pemberian subsidi solar dengan menurunkan harga solar menjadi Rp4.500 serta stimulus fiskal dalam bentuk belanja tambahan sebanyak Rp10,2 triliun," katanya.

Sri Mulyani mengatakan, stimulus fiskal tambahan sebesar Rp10,2 triliun itu terutama diberikan bagi kementerian atau lembaga untuk belanja mereka yang dapat menciptakan kesempatan kerja secara cepat di bidang infrastruktur maupun program pengentasan kemiskinan yang dianggap memiliki efektivitas maupun prioritas paling tinggi.

"Nanti dalam Rp10,2 triliun itu akan kita finalkan dan matangkan dengan para menteri lain dan akhirnya disampaikan pada DPR," ujarnya.

Stimulus fiskal, kata dia, selain disampaikan untuk peningkatan lapangan kerja juga untuk fokus pelaksanaan aktivitas dari usaha menengah, juga untuk menjaga daya beli masyarakat seperti untuk menurunkan harga obat, minyak goreng, dan harga komoditas guna mengurangi beban masyarakat.

Bentuk stimulus fiskal yang lain juga dimaksudkan untuk memberikan penguatan pada sektor usaha agar daya saing dan daya tahan pengusaha bisa meningkat, baik subsidi untuk PPn, fasilitas untuk PPh pasal 21 yang dipercepat, bahkan termasuk fasilitas untuk menanggung PPh pasal 21 seperti pajak penghasilan untuk karyawan dan tenaga kerja dan juga potongan tarif listrik untuk industri, penurunan harga solar, pembiayaan dan penjaminan biaya ekspor.

Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung sejak pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 17.00 WIB itu dihadiri wakil presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet Indonesia Bersatu antara lain ketiga Menko, Menlu, Mendag, Menhan, dan Menperin. (Antara)

## **2. Al Jazair Tawarkan Proyek Konstruksi**

Pemerintah Aljazair menawarkan peluang pasar jasa konstruksi dan jasa konsultasi kepada kontraktor Tanah Air ikut berpartisipasi membangun infrastruktur di sana.

Dalam paparannya kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, di Jakarta, Selasa (13/1), pemerintah Aljazair yang diwakili Menteri Pekerjaan Umum Amar Ghoull menawarkan ratusan proyek pembangunan.

Dalam pertemuan itu, Amar Ghoull mengungkapkan, negaranya tengah memacu pembangunan infrastruktur dengan menetapkan lima sektor prioritas hingga tahun 2025. Kelima sektor infrastruktur itu, yaitu jalan dan jembatan, perkeretaapian, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan perumahan.

Dia menyebutkan, beberapa proyek di negaranya antara lain 5.000 proyek pembangunan jalan, 500 proyek pembangunan jembatan, 2.000 proyek terkait air dan sanitasi dan 200 proyek studi kelayakan.

"Datang saja secepatnya, tinggal pilih proyeknya, negosiasi, dan langsung saya kasih (proyeknya)," ujar dia.

Untuk bidang perumahan rakyat, Aljazair telah mempunyai program satu juta rumah, 40 persen merupakan bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat kurang mampu.

"Di Aljazair masyarakat masih menggunakan jalan raya. Sisanya kereta api. Kita masih dalam progres pembangunan," kata dia.

Menyadari besarnya kebutuhan akan kontraktor dan konsultan untuk mewujudkan target pembangunan infrastruktur, negara berpenduduk 35 juta ini menawarkan peluang usaha ini kepada Indonesia.

Menteri PU Djoko Kirmanto menyambut baik penawaran peluang pasar jasa konstruksi di Aljazair. Menteri PU mengundang langsung kontraktor-kontraktor Indonesia menggarap proyek pembangunan jalan, jalan kereta api, pelabuhan udara dan laut, serta perumahan.

"Para kontraktor nasional jangan hanya rebutan proyek dalam negeri, tetapi juga bisa berkompetisi di negara lain seperti Aljazair," ucap Djoko. Menindaklanjuti penawaran ini, dia berencana mengunjungi Aljazair dalam waktu dekat. Dalam acara itu pemerintah mengundang perusahaan negara antara lain PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan, PT Jasa Marga Tbk, dan Perusahaan Umum Perumahan Nasional (Perumnas).

Pada akhir pertemuan itu, kedua Menteri PU juga menandatangani nota kesepahaman antara lain mengenai kerja sama teknis, program-program infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia.

Direktur Utama Wijaya Karya Bintang Perbowo masih akan mempertimbangkan undangan pemerintah Aljazair. Saat ini, Wijaya telah memiliki proyek di negara itu dan masih tahap penyelesaian. PT Wijaya Karya, telah berpartisipasi dalam proyek sipil terbesar di negara (East-West Motorway Project) sebagai mitra konsorsium Jepang (COJAAL). PT Wijaya Karya sejak akhir 2007 telah mendatangkan 850 pekerja terampil Indonesia ke Aljazair. (Jurnal Nasional)

## **3. Presiden Minta Pengusaha Turunkan Harga**

PT Kereta Api Daerah Operasional VIII Surabaya akan menurunkan tarif kereta ekonomi 10 persen.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta para pengusaha segera menurunkan harga barang produksi menyusul penurunan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 15 Januari 2009.

"Para pengusaha ya harus punya hati untuk segera menyesuaikan harganya. Jangan cost of production (biaya produksi) sudah turun tapi pura-pura tidak tahu dan tetap mempertahankan harga lama," kata Presiden dalam pidatonya di acara peringatan ulang tahun ke-52 Legiun Veteran RI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/1).

Menyusul penurunan harga BBM bersubsidi, kata dia, tarif angkutan otomatis turun 10 persen terutama yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara semisal Damri, ASDP

(Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan) dan kereta api. "Kalau kewenangan gubernur/bupati/wali kota harus disesuaikan karena tidak masuk akal (BBM) turun 25 persen, 18,2 persen kok (tarif angkutan) tidak turun-turun."

Kepala Negara menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir pemerintah telah menurunkan harga premium sebesar 25 persen dari Rp6.000 ke Rp4.500, sedangkan solar turun 18,2 persen dari Rp5.500 menjadi Rp4.500.

Presiden menyatakan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan daya beli masyarakat dapat dilihat dari subsidi yang diberikan untuk minyak tanah yang tergolong besar. Begitu pula untuk dunia usaha, di mana pemerintah telah menurunkan tarif dasar listrik untuk keperluan industri demi terjaganya pergerakan sektor riil.

SBY menyatakan kebijakan penurunan BBM tidak ada kaitannya sama sekali dengan rencana pencalonan dirinya kembali menjadi Presiden dalam pemilihan umum mendatang. Hal ini ia sampaikan untuk membantah pihak-pihak yang mengaitkan keputusan penurunan BBM dengan pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif mendatang.

"Bisa saja orang bicara seperti itu, semua hal bisa dijadikan politik. Kita tidak berbuat dikomentari, kita berbuat juga ikut dikomentari, tapi tidak apa-apa," ujarnya.

PT Kereta Api Daerah Operasional VIII Surabaya akan menurunkan tarif kereta api kelas ekonomi 10 persen mulai Februari 2009 menyusul penurunan harga premium dan solar. "Saat ini masih membahas besaran penurunan tarif itu untuk diajukan kepada pemerintah. Dari hasil pembahasan sementara muncul angka antara 5-10 persen," kata Humas PT KA Daop VIII Sugeng Priyono di Surabaya, kemarin.

Menurut Sugeng, selain karena penurunan harga BBM, penurunan tarif kelas ekonomi juga disebabkan faktor harga suku cadang yang turun. "Kita melihat penurunan tarif ekonomi ini karena 2004 sampai saat ini kita belum pernah melakukannya," katanya.

Tarif kereta yang akan diturunkan di antaranya KA Rapid Dhoho jurusan Surabaya-Malang/Kertosono-Blitar dan KA Penataran jurusan Surabaya-Bangil-Malang-Blitar, yang kini tarifnya Rp6.000. "Dari Surabaya itu ada sekitar 50 rangkaian kelas ekonomi dalam sehari yang akan kita turunkan tarifnya, kecuali KA Komuter jurusan Surabaya-Sidoarjo karena tarifnya cuma Rp 2.500," katanya.

Kereta ekonomi jurusan Purwokerto, Bandung, dan Jakarta juga akan diturunkan. Saat ini tarif kereta ekonomi tujuan Bandung, Jakarta dan Purwokerto antara Rp50 ribu-Rp60 ribu.

### **Panggil Organda**

Menteri Dalam Negeri Mardiyanto mengimbau jajaran kepala daerah, gubernur, bupati dan wali kota segera memanggil Organisasi Angkutan Darat (Organda) di wilayahnya masing-masing terkait rencana penurunan harga BBM yang berlaku Kamis (15/1) besok.

"Saya imbau gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera memanggil Organda, YLKI, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meninjau kembali tarif angkutan bagi kepentingan masyarakat," kata Mardiyanto di sela-sela rapat kerja pemantapan persiapan pemilu di daerah dan koordinasi pelaksanaan pemerintahan daerah di Pekanbaru Riau, Selasa (13/1).

Melalui penurunan harga BBM ini diharapkan Organda juga menurunkan tarif angkutan umum yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Ia minta pemerintah daerah segera meninjau kembali ketentuan tarif angkutan yang kini berlaku di daerah jika konsisten terhadap kebijakan pro rakyat. "Jadi kalau kita ingin konsisten implementasi kebijakan untuk rakyat maka bisa segera ditinjau, nggak usah ragu-ragu realisasinya di lapangan."

Ketua Organda Jawa Tengah Budi Anggoro menyatakan pihaknya belum memutuskan apakah akan menurunkan tarif angkutan menyusul penurunan harga BBM 15 Januari. Hingga kini, Organda juga belum merealisasikan penurunan tarif 4,4 persen pascapenurunan harga BBM 15 Desember 2008 lalu.

"Saat ini, belum bisa menyikapi apa-apa, kami akan mengadakan rapat koordinasi dengan para pengusaha transportasi secepatnya," kata Budi kepada Jurnal Nasional di Semarang, kemarin.

"Soal penurunan tarif angkutan 4,4 persen itu, kita juga masih menunggu. Sebab, belum ada keputusan dari Gubernur Jawa Tengah. Apalagi untuk yang penurunan kali kedua ini."

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Djoko Wahjudi menyatakan penurunan BBM cukup berpengaruh terhadap sektor-sektor non resesi, seperti perusahaan rokok, farmasi, dan transportasi.

"Tentu saja dampaknya cukup positif karena dapat meringankan keuangan internal perusahaan," ujarnya sesuai dengan pendapat dengan Komisi E DPRD Jateng, kemarin (13/1). (Jurnal Nasional)

#### **4. Kreditor Luaskan RI Atur Proyek**

Sebanyak 22 lembaga keuangan internasional dan negara kreditor menandatangani dokumen Komitmen Jakarta, yang berarti kesediaan kreditor untuk mengizinkan Indonesia mengatur dan mengambil alih kepemimpinan dalam semua proyek yang didanai pinjaman asing. Dokumen ini dibuat untuk menghindari duplikasi proyek dan mengoptimalkan setiap dana yang dipinjam Indonesia dari luar negeri.

Penandatanganan Komitmen Jakarta dilakukan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Senin (12/1) malam.

Data yang dihimpun Selasa (13/1) menunjukkan, posisi pinjaman luar negeri Indonesia, termasuk kepada 22 kreditor tersebut, mencapai 55,77 miliar dollar AS. Jumlah itu terdiri atas 33,42 miliar dollar AS pinjaman bilateral, dan sisanya 18,35 miliar dollar AS pinjaman multilateral.

Kebutuhan untuk mendapatkan pinjaman luar negeri pada tahun 2009 meningkat seiring perkiraan sebagian besar masyarakat dunia akan lesunya pasar modal dan keuangan. Akibatnya, pemerintah perlu mengalihkan sumber pembiayaan APBN 2009 dari penerbitan obligasi ke pinjaman asing langsung.

APBN 2009 menargetkan penarikan pinjaman luar negeri senilai Rp 52,2 triliun. Namun, pemerintah telah berbicara dengan beberapa kreditor untuk mendapatkan pinjaman siaga dengan target sekitar 5,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 60,5 triliun. Pinjaman siaga ini akan digunakan jika separuh dari target penerbitan obligasi negara gagal dicapai. Target penerbitan obligasi negara pada tahun 2009 mencapai Rp 99,7 triliun.

Dokumen Komitmen Jakarta ditandatangani antara perwakilan 22 kreditor dan pemerintah Indonesia yang diwakili Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas Lukita Dinarsah Tuo, Dirjen Pengelolaan Utang Departemen Keuangan Rahmat Waluyanto, dan Deputy Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Kementerian Menko Perekonomian Mahendra Siregar. Para kreditor itu adalah Bank Pembangunan Asia (ADB), Agen Pembangunan Perancis (AFD), Lembaga Kerjasama Internasional Jepang (JICA), Lembaga Kerjasama Internasional Korea (KOICA), Kerjasama Pembangunan Internasional Selandia Baru (NZAID), Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Departemen Pembangunan Internasional Inggris (DfID) dan Bank Dunia.

Selain itu ada juga Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga yang ada di bawah naungannya, lalu pemerintah Australia, Austria, Kanada, Uni Eropa, Finlandia, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Polandia, dan Swedia.

Menurut Menteri negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, porsi pinjaman dan hibah luar negeri kurang dari lima persen terhadap total APBN. Keberadaan pinjaman itu tidak mengganggu kemandirian pendanaan pembangunan, sehingga pemerintah akan tegas menolak pinjaman dan hibah luar negeri yang tidak sesuai dengan mekanisme di dalam negeri.

"Penolakan pernah dilakukan antara lain dengan pembubaran CGI (Consultative Groups on Indonesia) dan percepatan penyelesaian pinjaman Dana Moneter Internasional," ujarnya.

##### **Kepemilikan program**

Aspek terpenting dalam Komitmen Jakarta adalah kepemilikan atas program atau proyek yang dijalankan di Indonesia. Dengan komitmen ini, pemerintah bisa meminta kreditor untuk melaksanakan kreditnya sejalan dengan kepentingan dan prioritas nasional. Selain itu, Indonesia bisa memimpin pelaksanaan proyeknya. Selanjutnya, para kreditor harus menyesuaikan rencana kreditnya dengan sistem penganggaran dan pengadaan barang serta jasa di dalam negeri.

Kesepakatan ini akan mengurangi program pinjaman atau hibah yang bersifat mengikat (tied aid). Sebagai ilustrasi, pinjaman yang bersifat mengikat itu kerap ditekankan oleh pihak Jepang, antara lain dalam penentuan kontraktor, pengadaan barang, bahan baku, dan konsultan proyek harus berasal dari Jepang.

Jepang adalah salah satu kreditor terbesar Indonesia. Maka, Komitmen Jakarta akan memberikan dampak besar pada pembicaraan utang luar negeri bilateral dengan Jepang ke depan.

Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani komitmen seperti ini bersama kreditornya. Ini tercapai setelah pemerintah memaksa kreditor mengubah cara-cara pemberian pinjaman.

"Selama ini, negara yang meminjam, tangannya selalu di bawah (posisi meminta dan tidak punya daya tawar kuat), sehingga mereka biasanya didikte dengan berbagai persyaratan dan kriteria. Nah, Komitmen Jakarta ini memberikan kesamaan posisi atau kemitraan yang lebih sederajat," kata Sri Mulyani.

Pengamat Ekonomi Fadhil Hasan mengatakan, pinjaman luar negeri hanya akan efektif dan optimal jika diperoleh atas dasar permintaan dan kebutuhan Indonesia (demand driven). Selama ini justru sebaliknya, pemberian pinjaman dilakukan karena pihak kreditor yang mengaturnya dan kerap tidak sesuai kebutuhan mendesak di Indonesia.

Selain itu, pinjaman luar negeri juga akan optimal jika Indonesia siap dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Saat ini, penyerapan pinjaman luar negeri tergolong rendah, padahal Indonesia sudah bayar komisi.

Pinjaman juga bisa efektif jika proyek yang didanai asing itu menggunakan konsultan dan barang produk dalam negeri. Namun, penggunaan produk dalam negeri itu masih sangat rendah, akibatnya manfaat proyeknya kembali ke negara kreditornya.

"Jika semua hal itu ada dalam Komitmen Jakarta, maka pinjaman luar negeri akan jauh lebih optimal," ujar Fadhil. (OIN) (Kompas)

## C. SOSBUD

### 1. Indonesia seeks Australian help in ferry probe: official

Indonesian and Australian investigators will join forces to probe the Sulawesi ferry disaster that left more than 230 people missing and feared dead this week, officials said Tuesday.

Indonesia's National Transport Safety Committee (KNKT) said the Australian Transport Safety Bureau (ATSB) would help Indonesian investigators examine the cause of Sunday's accident.

"ATSB investigators will arrive in Jakarta on Wednesday. They will help us analyse collected data fields to find out the cause of the ferry disaster," KNKT official Sapandri Widiyanto was quoted by AFP as saying.

Five investigators were already working to find out what happened, amid allegations the captain ignored storm warnings and authorities allowed the ferry to exceed its load capacity.

The transport minister has said the weather was fair at Pare-Pare port, Sulawesi, when the captain decided to set sail late Saturday for Samarinda, an overnight journey across the treacherous Makassar Strait to Borneo island.

The 700-tonne ferry capsized and sank in heavy seas when it was hit by a severe tropical storm before dawn on Sunday.

It was the worst disaster of its kind in Indonesia since December 2006 when a ferry sank in a storm off the coast of Java, killing more than 500 people, although smaller ferries sink regularly across the massive archipelago.

Transport ministry senior official Sunaryo said investigators would look at why the captain, who survived, had ignored storm warnings when he set sail on Saturday afternoon.

"We are questioning the ferry captain and port administrators who issued a permit for the ferry to sail amid a series of warnings from the meteorology office over the bad weather," Sunaryo said.

"We will investigate which party is responsible in this case, and if anything is proven we will bring them to justice."

KNKT chief Tatang Kurniadi said the probe would also consider why the ferry sank so fast.

"Based on survivors' accounts to our investigators, they said the sinking process happened in only a couple of minutes," he said.

The cooperation with Australia falls under a previous accord allowing for joint investigations of major transport disasters.

"This ferry accident is a major one, that's why we have to involve Australian investigators as mentioned in our cooperation agreement," Widiyanto said. (Antara)

## 2. Pemerintah Usahakan Pemulangan Umi Saodah dari Gaza

Pemerintah Indonesia akan terus berusaha memulangkan Umi Saodah, Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang terjebak di jalur Gaza Palestina, agar bisa kembali ke tanah air secara selamat.

Selain itu, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) akan melacak dan meminta pertanggungjawaban PT AP, sebagai perusahaan jasa TKI (PJTKI) yang memberangkatkan Umi Saodah, demikian siaran pers Depnakertrans di Jakarta, Selasa.

Depnakertrans menyebutkan, Palestina bukan negara tujuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), karena itu PJTKI yang menempatkan Umi akan dimintai pertanggungjawabannya.

"Kami akan berkoordinasi dengan Polri,?" ujar Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Suparno, saat menerima Muh. Yasmin ( 59), ayah kandung Umi Saodah, di Ruang Rapat Menakertrans. Keluarga Umi Saodah didampingi Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care.

Menakertrans menjelaskan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Departemen Luar Negeri untuk segera menemukan Umi Saodah dan memulangkan ke tanah air. Di sisi lain dia meminta semua pihak memahami situasi di jalur Gaza sedang diamuk perang sehingga upaya pemulangan jadi tidak mudah.

"Kita terus berusaha membuka jalur komunikasi dengan pihak-pihak terkait," kata Erman.

Selain berupaya untuk memulangkan Umi, Depnakertrans melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) akan mengusut perusahaan atau pihak yang menempatkan Umi ke Palestina.

"Hak-hak Umi sebagai seorang pekerja di luar negeri harus tetap dipenuhi. Demikian juga dengan asuransinya yang dulu diurus oleh yayasan tenaga kerja," katanya.

Menakertrans mengakui terdapat beberapa kasus penempatan TKI di luar negara tujuan penempatan yang terlarang, terutama di daerah konflik, seperti Irak dan Palestina.

Di masa mendatang, Depnakertrans akan memperketat pengawasan terhadap penempatan TKI ke luar negeri, termasuk memberikan sanksi tegas kepada PJTKI yang nakal.

"Biasanya pemberangkatan TKI di luar negara penempatan dilakukan secara ilegal oleh perusahaan ilegal. Bisa juga mereka ditempatkan secara legal kemudian dipindahkan ke negara di luar tujuan penempatan secara ilegal," katanya.

Kemungkinan lain, TKI atau perusahaan memanfaatkan mekanisme "visa on arrival" suatu negara untuk menempatkan tenaga kerja secara ilegal.

Sementara itu, Muh Yasmin ( 59), ayah kandung Umi Saodah meminta pemerintah bisa memulangkan Umi Saodah.

"Kami mohon bantuannya agar Umi Saodah bisa pulang dengan selamat. Tiap malam ibunya selalu menangis karena sudah delapan tahun dia tidak pulang," kata Yasmin.

Anis Hidayah meminta pemerintah mengusut perusahaan atau pihak-pihak yang menempatkan Umi hingga terjebak di jalur Gaza, Palestina.

"Hal ini ini bisa dikategorikan sebagai <i>trafficking</i> atau perdagangan manusia karena Palestina bukan negara penempatan TKI dan memiliki potensi konflik yang tinggi," ujar Anis menambahkan. (Antara)

## 3. Pembantu Asal Indonesia Bunuh Diri di Yordania

Seorang tenaga kerja perempuan Indonesia, bunuh diri dengan cara melompat dari lantai tiga sebuah rumah sakit di Amman, Yordania. Aksi nekat ini dilakukannya karena kecewa majikannya memutuskan membawanya pulang dari rumah sakit tempat ia dirawat.

"Si majikan memaksa membawa wanita itu keluar dari rumah sakit, Senin kemarin. Si pembantu sendiri dirawat di rumah sakit akibat cedera di kepala setelah terjatuh di rumah majikannya," ujar juru bicara Kementerian Kesehatan Yordania, Hatem al-Azroai, Selasa (13/1).

Azroai menambahkan dokter telah mengatakan korban perlu tetap dirawat di rumah sakit untuk menyembuhkan cedera yang dialami. Namun, hal ini tidak didengarkan oleh majikan pembantu tersebut dan tetap ngotot membawanya pulang.

"Setelah itu si pembantu tiba-tiba meloncat dari jendela. Ia kemudian tewas walau dokter sempat berusaha memberikan pertolongan. Hasil autopsi nanti akan dikirim ke kepolisian yang akan melakukan penyelidikan kasus ini," jelasnya. Belum didapat informasi identitas tenaga kerja asal Indonesia tersebut.

Lembaga Amnesti Internasional yang bermarkas di London menyatakan laporan November tahun lalu menyebutkan puluhan ribu pekerja perempuan di Yordania mengalami perlakuan tidak semestinya. Mereka diisolasi, di eksploitasi, dan menjadi korban pelecehan. Mereka juga hanya sedikit bahkan sama sekali tidak mendapat perlindungan dari pemerintah.

Pusat HAM Nasional Yordania menyalahkan pemerintah negara tersebut yang gagal melindungi hak pekerja lokal. Mereka menuntut dilakukan perubahan atas undang undang ketenagakerjaan yang ada.

Di Yordania, saat ini diperkirakan terdapat 70 ribu pekerja perempuan asing, 40 ribu diantaranya terdaftar. Banyak dari para pekerja ini berasal dari Asia Tenggara dan selatan, terbanyak dari Indonesia, Filipina, serta Sri Lanka. (Media Indonesia)

#### **4. Disnakertrans Petakan PHK TKI**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (disnakertrans) Kabupaten Malang menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Tujuannya, menurut Kepala Disnakertrans Kabupaten Malang, Djaka Ritamtama, kepada wartawan, Selasa (13/1) untuk mempetakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Kami bekerja sama dengan beberapa LSM. Itu untuk mempetakan adanya TKI yang mengalami PHK di luar negeri. Sebab, TKI asal Kabupaten Malang ada yang mengalami PHK. Hanya saja, jumlahnya belum diketahui," terang dia.

Untuk mengetahui berapa jumlah TKI yang mengalami PHK saat bekerja di luar negeri, Disnakertrans bekerja sama dengan LSM. Beberapa LSM, kata dia, nantinya yang melacak informasi terkait dengan TKI tersebut. Makanya, tandas dia, LSM yang diajak untuk bekerjasama dalam memetakan TKI yang ter-PHK di luar negeri.

"Mereka yang sudah terpetakan dan terdata dengan baik akan dikumpulkan," jelasnya. Para TKI yang ter-PHK atau di-PHK dan kini kembali ke daerah kabupaten Malang itu akan dikumpulkan untuk diberi keterampilan lewat pelatihan-pelatihan. Sehingga, mereka tidak kembali lagi menjadi TKI di luar negeri.

Bahkan, dia berjanji akan mengupayakan para TKI yang sudah di-PHK tersebut bekerja di perusahaan. Hanya saja, dia akan melihat potensi dan kemampuan dari TKI yang sudah kembali ke Kabupaten Malang. Dia menjelaskan bahwa para TKI yang di-PHK itu tidak hanya yang sudah kembali ke kampung halamannya. Namun, juga bagi mereka yang masih bekerja di sana.

Dengan adanya program ini, diharapkan para TKI yang dipulangkan bisa membuka usaha sendiri di rumahnya. Hanya saja, Djaka belum bisa memastikan berapa TKI asal Kabupaten Malang yang dipulangkan akibat dampak krisis global ini.

Dia memprediksi cukup banyak. Sehingga, pengiriman uang (remitensi) TKI asal Malang untuk tahun 2009 ini bakal menurun dibanding tahun 2008 yang mencapai sekitar Rp 360 miliar atau Rp 30 miliar per bulan. Berdasarkan kondisi tersebut, dia akan mengupayakan program khusus bagi TKI yang terkena PHK. Sehingga, perlu dipetakan. Pemetakaannya Disnakertrans bekerja sama dengan beberapa LSM. "Itu untuk mempermudah," tandasnya. (Republika)

#### **5. Universitas Rusia Tandatangani Kerjasama dengan Universitas Indonesia**

St.Petersburg State Polytechnical University of Russia akan menandatangani kerjasama di bidang pendidikan dengan Universitas Indonesia, hari ini, di Universitas Indonesia, Depok. Rencananya, Wakil Duta Besar RI untuk Rusia dan Wakil Rektor St. Petersburg, beserta beberapa anggota delegasi dari Rusia akan hadir dalam acara ini.

"Penandatanganan ini menandai dimulainya berbagai program kerjasama pendidikan, seperti pertukaran pelajar, pengembangan riset, program penelitian bersama dan peningkatan kapasitas pendidikan sains dan teknologi UI," kata Rektor Universitas Indonesia, Gumilar R. Somantri, dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu (14/1).

Menurut Gumilar, Rusia merupakan produsen kaum intelektual dunia. Sudah banyak pemenang hadiah Nobel berasal dari negara "beruang putih" itu. St.Petersburg State Polytechnical University of Russia, yang berdiri sejak 1899, merupakan tanah asal para ilmuwan terbaik dunia asal Rusia. Misalnya, D.I Mendeleev, yang mengukir sejarah dunia dengan menyusun unsur-unsur kimia. Juga ada Stephen P Timoshenko, yang dikenal melalui buku dan kontribusinya pada ilmu kekuatan bahan.

Sederet nama peraih Nobel, seperti N.N.Semyonov (Nobel Kimia, 1956), P.L. Kapitsa (Nobel Fisika, 1978) dan Zh.I.Alferov (Nobel Fisika, 2000), Gumilar melanjutkan, juga merupakan akademisi yang mengabdikan dirinya di St.Petersburg State Polytechnical University of Russia. "Mereka menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi umat manusia," kata dia

Dengan kerjasama ini, kata Gumilar, diharapkan mampu menjadi jalan munculnya penemuan-penemuan kelas dunia oleh Indonesia. Menurut dia, Universitas Indonesia sebagai Universitas tertua di Indonesia (berdiri 2 Januari 1849), pernah memiliki seorang peraih Nobel bidang Fisiologi dan Kedokteran pada 1920, yaitu Christiaan Eijkman. Penghargaan itu diraih melalui penemuan vitamin B1 untuk mencegah terjangkitnya penyakit beri-beri.(Tempo Interaktif)

## **6. Tampang Pekerja Indonesia, Wanita Hong Kong Didenda Rp 4,3 Juta**

Seorang ibu rumah tangga di Hong Kong, Selasa (13/1), didenda 3.000 dolar Hong Kong (Rp 4,3 juta) karena menampar seorang pekerjanya yang berasal dari Indonesia. Lok Hung-tan, 29 tahun, menampar karena Yatini, 25 tahun, terlambat bangun lima menit.

Hakim Kwun Tong, Anthony Kwok Kai-on mengatakan tindakan Lok mencoreng citra para majikan Hong Kong yang mungkin dianggap brutal. Akan tetapi, karena Lok mengalami gagal ginjal dan depresi, Anthony hanya menjatuhkan denda kepada Lok. Denda 2.000 dolar Hong Kong (sekitar Rp 2,8 juta) untuk pengadilan, dan 1.000 dolar Hong Kong (sekitar Rp 1,4 juta) untuk Yatini.

Lok sendiri mengaku bersalah melukai tubuh korban menyusul penamparan pada 17 Desember. Lok sempat mengancam memotong 100 dolar Hong Kong (sekitar Rp 143 ribu) gaji Yatini karena Yatini bangun terlambat. Ketika Yatini memprotes, Lok menampar Yatini sehingga bibir Yatini berdarah dan wajahnya memar-memar.

Pengacara Lok mengatakan suami Lok berjanji akan mengerjakan sendiri pekerjaan rumah tangga mereka dan tidak akan mempekerjakan buruh sampai kondisi Lok stabil. (Tempo Interaktif)

## **D. HANKAM :**

### **1. Pergantian Dua Pesawat Tempur Tunggu Depkeu**

Rencana penggantian dua pesawat tempur TNI AU, yakni OV-10 Bronco dan Hawk MK-53 masih menunggu persetujuan alokasi anggaran dari Departemen Keuangan(Depkeu).

"Persetujuan alokasi anggaran belum turun menggunakan kredit ekspor yang mana," kata Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan (Dephan) Marsda Eris Herryanto di Jakarta, Selasa (13/1).

Dia menjelaskan, Dephan sudah melakukan kajian spesifikasi teknis dan persyaratan operasional pesawat pengganti dua pesawat tersebut. Namun, karena belum ada persetujuan, belum bisa ditentukan jenis dan negara mana pengadaan pesawat baru tersebut.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI AU (KSAU) Marsekal Subandrio mengatakan, penggantian kedua pesawat tidak bisa ditunda. Alasannya, Bronco sudah dikandangkan sejak medio 2007 lalu. Sedangkan dari enam unit MK-53 yang ada, hanya dua unit yang kondisinya siap terbang. Ketersediaan suku cadang yang makin sulit mengakibatkan tingkat kesiapan MK-53 makin menurun.

Matra udara merekomendasikan Super Tucano dari Brasil untuk menggantikan Bronco. Sementara untuk pengganti MK-53 TNI AU mengaku hingga kini masih menggodok berbagai jenis pesawat. Setidaknya terdapat lima alternatif, yakni, L-159B dari Republik Chek, Yak-130 dari Rusia, Aermacchi M346 asal Italia, Chengdu FTC-2000/JL-9 dari China, dan B-50 asal Korea.

Pilot-pilot tempur matra udara pun telah mencoba seluruh pesawat-pesawat tersebut. Namun, KSAU masih mengelak menyebutkan pesawat mana yang menjadi prioritas TNI AU. Mengenai spesifikasi, Subandrio mengungkapkan, Mabes AU menginginkan pesawat yang dipilih tidak hanya untuk keperluan latihan. Pesawat juga harus bisa "berkelahi" agar dapat mengantisipasi kehadiran pesawat asing di dalam yurisdiksi udara nasional. (Jurnal Nasional)

### **2. Pemotongan Anggaran Pertahanan Berpotensi Membahayakan Negara**

Departemen Pertahanan dan Mabes TNI mengadakan rapat pimpinan 2009 di Gedung Dephan, Jakarta. Panglima TNI Jenderal Djoko Susanto meminta Dephan agar mengupayakan mempertahankan alokasi anggaran operasional dari ancaman pemotongan anggaran akibat krisis global. Hal tersebut dianggap dapat membahayakan kemampuan TNI untuk melakukan tugasnya sebagai penjaga kedaulatan negara.

"Menanggapi keterbatasan anggaran, panglima memberikan tanggapan untuk perlunya upayakan agar anggaran operasional TNI tahun 2009. Oleh karena, beberapa pemotongan anggaran yang dilaksanakan ditengarai akan membahayakan kemampuan TNI untuk menjaga stabilitas nasional," kata Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Jakarta, Selasa (13/1).

Menurut RAPBN 2009, alokasi dana yang dianggarkan untuk Dephan dan Mabes TNI direncanakan sebesar 33,6% dari total 1000 triliun. Juwono menyatakan besaran anggaran tersebut juga tidak terlepas dari ancaman pemotongan 10% dalam dua tiga bulan ke muka. Untuk itu, pihaknya akan meminta kepada Depkeu untuk mendapat dukungan tambahan membiayai operasional TNI.

"Kita tahu jika TNI adalah institusi yang paling utama menjaga keutuhan wilayah, menjaga kedaulatan. Kami minta ke Depkeu pada anggaran 2009 ini, tolong dibantu kembali sekitar Rp 460 miliar agar tugas-tugas minimum operasi di 2009 bisa dilaksanakan," sambung Menhan.

Namun demikian, Panglima TNI menyatakan telah mempersiapkan rencana kegiatan lain untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Beberapa tindakan yang akan dilakukan diantaranya adalah penghematan terkait pengadaan kegiatan seremonial dan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Terhadap urusan domestik, Panglima menolak menjelaskan dengan alasan rahasia negara.

"Kalau saya umumkan berarti saya panglima paling bodoh di dunia," ujarnya.

Panglima TNI juga menegaskan agar tidak perlu khawatir dengan keterbatasan yang ada. Menurutnya, TNI sudah terbiasa dengan kondisi demikian dari semula. Berdasarkan pengalaman tersebut, TNI tetap akan menerapkan anggaran secara lebih efisien dan efektif serta disusun sesuai prioritas. (Media Indonesia)

## **E. HUKUM :**

### **1. Pemerintah Siapkan Tiga Opsi**

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menyiapkan tiga opsi untuk menyikapi putusan Pengadilan Royal Court of Appeals Guernsey, Inggris, yang mencabut status pembekuan uang Tommy Soeharto.

Saat ini pemerintah yang diwakili Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang mengkaji upaya-upaya hukum itu. "Kami punya tiga opsi," ujar Jaksa Agung Hendarman Supandji di Jakarta kemarin. Adapun ketiga opsi itu, menurut Hendarman, adalah mengajukan kasasi atas putusan yang mencabut pembekuan uang Tommy tersebut ke Mahkamah Agung (MA), mengajukan peninjauan ulang, dan mengajukan gugatan ulang ke pengadilan yang sama.

Sebagaimana diketahui, Pengadilan Royal Court of Appeals Guernsey pada 9 Januari 2009 dalam putusan banding mencabut status pembekuan uang Tommy Soeharto. Putusan itu mengabulkan permintaan pihak Tommy yang tidak terima dengan putusan pengadilan tahap pertama yang mengabulkan permohonan Pemerintah RI, yakni membekukan uang Tommy.

Pembekuan uang Tommy di Guernsey ini bermula ketika Banque National de Paris (BNP) Paribas, Guernsey, menolak permintaan Garnet Investmen Limited, perusahaan milik Tommy, untuk mencairkan uangnya sebesar 36 juta Euro. BNP beralasan uang Tommy tidak jelas asal-usulnya.

Merasa tidak dapat menerima perlakuan itu, Tommy lalu menggugat BNP Paribas pada Maret 2006. Mengetahui adanya perkara antara Garnet dan BNP Paribas, Pemerintah RI melalui Kejagung mengajukan gugatan intervensi dalam perkara Garnet- BNP Paribas. Pasalnya, Tommy mempunyai sejumlah perkara hukum di Indonesia.

Kemudian, Kejagung meminta pengadilan membekukan uang Tommy. Pengadilan menerima permohonan itu. Selanjutnya, Tommy mengajukan langkah hukum berupa banding supaya uangnya di BNP Paribas dapat dicairkan. Sementara itu, Koordinator Masyarkat Antikorupsi Indonesia (MaKI) Boyamin Saiman menilai pemerintah harus mengajukan kasasi atas putusan pencabutan status beku uang Tommy.

Pasalnya, langkah ini menyangkut kehormatan negara. "Harus kasasi. Tidak boleh beralasan akan mengeluarkan biaya banyak untuk perkara ini. Sebab, hal ini menyangkut penegakan hukum dan kehormatan negara," ujarnya kepada SINDO kemarin.

Menurut Boyamin, kekalahan Kejagung dalam menghadapi kasus hukum Tommy menunjukkan Kejagung kurang serius sehingga memungkinkan adanya celah-celah hukum yang bisa ditembus. (Sindo)

**F. OLAH RAGA : Tidak Ada**

**G. LINGKUNGAN HIDUP : T i d a k**  
**Ada**

**III. ARTIKEL :**

#### **1. BHP dan Kapitalisme Global Oleh Siti Nuryati**

Gelombang penolakan terhadap disahkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP) terus terjadi. UU BHP memang bernuansa liberalisasi. Berkaca dari rintisan tujuh perguruan tinggi yang menyandang status sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang meraup dana masyarakat sebesar-besarnya karena alokasi dana pendidikan pemerintah yang tidak mencukupi, UI misalnya hanya menerima dana pemerintah kurang dari 10 persen dari total anggaran yang dibutuhkan, yaitu Rp 1,4 triliun. IPB mengandalkan subsidi pemerintah yang hanya Rp 4 juta per mahasiswa, padahal idealnya Rp 18 juta. Unpad menerima Rp 110 miliar per tahun untuk gaji dosen dan pegawai, sedangkan biaya operasionalnya mencapai Rp 320 miliar (Ali Khomsan, 2008).

Argumentasi yang melatarbelakangi pembentukan BHMN adalah tuntutan peranan perguruan tinggi dalam mempersiapkan daya saing bangsa memasuki era persaingan global. Lantaran kebanyakan kondisi pendidikan tinggi di Indonesia yang kian tertinggal bahkan terasing dari kebutuhan dan realitas sosial, ekonomi, dan budaya, maka pemerintah memandang perguruan tinggi memerlukan otonomi dan independensi. (Sinar Harapan)

#### **2. Prospek Perekonomian Indonesia 2009 Oleh Fahrudin Salim**

Krisis ekonomi global kini sudah mengarah pada ancaman resesi. Krisis ekonomi tidak hanya mengancam pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, tetapi juga negara berkembang. Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang tahun 2009 menjadi 4,5 persen dari proyeksi sebelumnya 6,4 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi negara maju, tahun 2009 akan mencapai 0,1 persen atau hampir tidak ada peningkatan sama sekali. Adapun pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan 1 persen.

Harus diakui, tidak ada satu negara pun yang kebal dari krisis keuangan global yang sedang melanda dunia. Selain karena seretnya likuiditas global, juga akibat merosotnya permintaan atas ekspor.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2009, pemerintah bersama DPR menetapkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen. Menurut economist intelligence unit, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009 diperkirakan hanya 3,7 persen, melorot jauh dari pertumbuhan tahun 2008 lalu yang diprediksi 6,1 persen. Akibat gejolak ekonomi global, pemerintah sudah membuat skenario pertumbuhan ekonomi yang pesimistis yakni 5-5,5 persen, moderat 5,5 persen-5,8 persen, dan optimistis 5,8-6 persen.

Namun, masih ada optimisme. Ada sejumlah perbaikan dan serangkaian pencapaian pada tahun-tahun terakhir ini. Misalnya, utang sektor publik yang terus menurun sejak tahun 2000. Termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi sehingga iklim investasi makin kondusif, perbaikan infrastruktur, dan pembenahan birokrasi. Langkah ini setidaknya membuat Indonesia bisa melesat pada posisi lebih baik ketika kepercayaan pasar telah kembali.

Dari sisi perbankan, Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2009 ini akan mencapai 22 persen-24 persen. Perkiraan pertumbuhan ekonomi itu lebih rendah dibanding 2008 yang diperkirakan mencapai sekitar 36 persen. Namun, angka perkiraan hampir sama dengan realisasi pertumbuhan kredit sekitar dua tahun lalu, dan lebih baik dari beberapa tahun lalu yang mencapai sekitar 18 persen.

Tahun 2009 mungkin perbankan harus mengalami keuntungan yang sedikit berkurang dibanding tahun 2008 karena memang kondisi perekonomian yang menurun. Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih bergerak cukup kuat dan konsumsi masyarakat masih cukup banyak.

Pada 2009 ini perbankan harus melakukan sharing labanya sehingga harus menurunkan atau menyesuaikan keuntungan pada keseimbangan baru. Penurunan giro wajib minimum (GWM) dari 9,6 persen menjadi sekitar 5 persen diharapkan menambah likuiditas di pasar. Dengan pemotongan GWM itu, ada tambahan likuiditas Rp 50 triliun di pasar. Sebagian sudah ada di pasar uang antarbank dan sebagian kembali ke BI.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi ekspor barang dan jasa 2009 diperkirakan tumbuh 9,5 persen-11 persen atau turun dibanding target minimal 2008 yang dipatok 12,5 persen.

Kondisi yang dihadapi tahun depan antara lain adalah ketatnya likuiditas perbankan sehingga akan menyulitkan importir untuk membuat letter of credit (L/C). Biaya ekspor juga meningkat akibat premi asuransi yang naik. Selain itu, penurunan harga komoditas seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan bahan tambang yang akan berlanjut pada 2009 ini.

Dari sisi investasi, lesunya perekonomian dunia tahun depan akan berdampak pada pertumbuhan investasi asing di Indonesia. Pertumbuhan investasi 2009 diprediksi 10-11,9 persen, memang lebih kecil dari sasaran pertumbuhan 2008. Karena itu, pertumbuhan ekonomi akan didorong dari pengeluaran pemerintah yang meski kecil yakni 4,6-5 persen, namun tetap menjadi stimulus permintaan domestik. Pengeluaran pemerintah sampai akhir 2008 diperkirakan sekitar 5,8 persen-6 persen.

Ganjalan yang dihadapi tahun 2009 adalah tingkat bunga yang tinggi dan terbatasnya likuiditas perbankan mengakibatkan terhambatnya kemunculan usaha baru. Di luar faktor finansial, keterbatasan infrastruktur, masalah undang-undang ketenagakerjaan, dan kurangnya pasok listrik serta meningkatnya persaingan antarnegara akan makin menyulitkan Indonesia untuk menarik investasi asing.

Meski demikian, jika ingin mencapai level yang lebih tinggi, Indonesia tetap harus memperbaiki faktor-faktor yang memberi kemudahan dalam memulai bisnis. Untuk mendukung hal itu, diperlukan kelembagaan investasi yang kuat. Karena itu, penanganan masalah investasi harus naik ke level yang tinggi pada tingkat kementerian, yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Dari sisi fiskal, anggaran pemerintah diharapkan mampu memberikan stimulus bagi perekonomian. Bisa saja anggaran 2009 yang sudah disetujui DPR akan berubah, asumsi makro berubah, dan anggaran juga berubah.

Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat penyerapan anggaran dengan perbaikan mekanisme perencanaan dan penyerapannya, dengan merevisi Keppres No 80/2003 yang dulu mengakibatkan ketakutan pimpinan proyek dalam mempercepat pembelanjannya. Semua sektor, departemen atau badan bisa mempercepat proses lelang pada 2009 sekalipun daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) belum disetujui Menteri Keuangan. Mereka tetap bisa membuat tender, tapi harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Perbaikan dari sisi prosedur pencairan anggaran akan dapat mempercepat penyerapan anggaran sehingga dapat menggerakkan perekonomian. Selain itu, langkah tersebut akan memberikan keleluasaan untuk melakukan stimulus fiskal pada saat-saat sulit seperti sekarang ini.

Mengingat motor pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum ada di sektor konsumsi, maka penting bagi pemerintah menjaga daya beli masyarakat agar penopang ekonomi kita ini tidak ambruk. Lewat kerja sama dengan BI, seyogianya fokus diarahkan pada usaha untuk mengendalikan inflasi.

Atas hal tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009, sekalipun berlangsung lebih lambat, akan dapat menyisakan peningkatan kualitas, lewat realisasi yang lebih terencana dan tepat guna. Sebagaimana umum terjadi, kualitas hanya akan meningkat pada saat munculnya kesadaran akan krisis. (Suara Karya)

### **3. Barat dan Dunia Islam Perlu Tekan Israel oleh DR KH A Hasyim Muzadi**

Pertempuran antara Palestina vs Israel memang tidak berimbang. Persenjataan yang dipunyai Hamas hanya roket-roket kecil melawan persenjataan canggih Israel, mulai dari bom curah hingga senjata kimia yang bisa membunuh secara massal.

Itu terlihat dari korban tewas pihak Palestina yang mencapai 900 orang lebih. Sebaliknya, Israel hanya 10 tentaranya yang tewas dan 13 tewas dari kalangan sipil. Meski PBB sudah mengeluarkan resolusi (Nomor 1860) agar keduanya segera melakukan gencatan senjata, namun bom-bom Israel terus dimuntahkan ke Jalur Gaza.

Publik dari seluruh dunia juga terus mendesak agar Israel menghentikan serangan brutalnya. Namun Israel bergeming. Seperti yang sudah-sudah, Israel seperti tak menghiraukan semua tekanan.

### **Mengurai Konflik**

Akar konflik Palestina-Israel sudah berlangsung lama, setidaknya sejak Israel berdiri tahun 1948. Dulu, ketika dunia Arab masih solid bersatu, yang dihadapi Israel adalah Liga Arab yang terdiri atas tujuh negara. Itu pun Israel yang didukung AS selalu bisa mengimbangi perlawanan terhadap dunia Arab.

Sekarang ini Israel hanya menghadapi satu faksi di Palestina saja, yaitu Hamas. Fatah, yang dulunya didirikan oleh almarhum Yaser Arafat, terlihat tidak begitu mendukung gerakan Hamas ini. Karena itu, kekuatan Palestina terus tergerogoti dan semakin mengecil, sementara kekuatan Israel semakin solid plus dengan didukung persenjataan mutakhirnya.

Faktor Hamas memang sepertinya menjadi semacam ganjalan bagi kembali menyatunya kekuatan Arab. Mesir yang dulunya disebut sebagai "Singa Padang Pasir" dan pernah berwibawa memimpin Liga Arab, terlihat kurang gereget menggalang kekuatan Arab untuk menghentikan serangan Israel.

Ini karena Hamas dianggap sebagai pecahan dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang dulunya didirikan di Mesir dan sekarang organisasi tersebut sudah dilarang di negeri bekas para Firaun itu. Faktor lainnya adalah persoalan domestik Israel dan Palestina sendiri, yang kini keduanya akan menyelenggarakan pemilu.

Ini berarti masing-masing partai di kedua negara itu tengah mencari simpati dari rakyat. Namun, kalau ini juga dimasukkan sebagai faktor yang dominan sungguh disayangkan, kepentingan politik untuk partai tertentu telah mengorbankan ratusan bahkan mungkin ribuan nyawa orang-orang tak berdosa, anak-anak, dan kaum perempuan. Jadi, konflik Palestina-Israel ini sejak dulu memang sepertinya bukan konflik agama.

Tidak bisa dikatakan bahwa konflik Israel-Palestina adalah antara pihak Islam melawan Yahudi. Karena faktanya, kedua negara, baik di Israel maupun Palestina, warganya terdiri atas Islam, Kristen, dan Yahudi, bahkan mungkin ada yang masih menganut kepercayaan lokal dan kaum atheis.

### **Perundingan Damai**

Meski upaya damai sudah mulai ditempuh, baik di tingkat PBB maupun sekarang yang dimediasi oleh Mesir, tampaknya kedua belah pihak belum hendak menyatakan mengibarkan bendera putih. Israel memang terlihat mulai merespons desakan dunia untuk menyudahi operasi militernya.

Perdana Menteri (PM) Israel Ehud Olmert mengajukan dua syarat: hentikan serangan roket Hamas dan penyelundupan senjata untuk Hamas dari Mesir ke Gaza. Sebaliknya, Hamas sepertinya tidak begitu percaya pada niat Israel itu. Karenanya Hamas menyatakan belum berpikir untuk mengibarkan bendera putih.

Malah Hamas menyatakan kepada seluruh simpatisannya agar terus berperang karena kemenangan sudah di ambang pintu. Jika kondisi ini terus berlanjut, jumlah korban sipil masih akan terus berjatuhan. Karena itu dunia harus segera terlebih dulu mendesak agar keduanya menghentikan peperangan agar ada jeda untuk berpikir dingin dan berunding.

Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan agar segera kondisi Timur Tengah kondusif untuk dilakukan perundingan damai. Pertama, dunia Islam, lewat Organisasi Konferensi Islam (OKI) atau Liga Arab, harus bertemu dan berunding dengan kalangan Barat yang diwakili Eropa dan Amerika Serikat.

Kalau dilihat reaksi masyarakat dunia, baik di dunia Islam maupun Barat, sepertinya semua serentak mendukung agar peperangan segera dihentikan. Dengan demikian, aspirasi warga dari dua belahan dunia itu perlu diteruskan ke tingkat formal yang dinyatakan oleh masing-masing negara.

Kedua, tempat pertemuan harus diadakan di negara yang netral. Artinya, tempat pertemuan harus bukan negara pendukung konflik. Seperti diketahui, ada dua negara yang terlihat di balik

konflik ini,yaitu Iran yang seakan mendukung Hamas dan Amerika Serikat yang mendukung Israel.

Bisa saja ada inisiatif agar pertemuan ini di gelar di Jakarta. Ketiga, substansi materi pertemuan haruslah menjangkau kepentingan perdamaian secara jangka panjang, kalau perlu perdamaian abadi. Karena itu harus diurai secara lebih saksama mengenai faktor-faktor penyebab konflik yang fundamental.

Keempat, kesepakatan yang sudah diambil dalam forum tersebut harus diteruskan menjadi resolusi PBB yang sifatnya lebih mengikat dan berdimensi penyelesaian menyeluruh dan bersifat abadi. Dengan tuntasnya penyelesaian konflik Palestina- Israel, sebenarnya menjadi kunci bagi penyelesaian perdamaian dunia.

Hal itu karena selama ini konflik terbesar yang hampir menyeret berbagai belahan dunia menyangkut Islam versus Barat.Semua konflik biasanya diarahkan ke Islamofobia, termasuk dikait-kaitkan dengan gerakan terorisme.

Maka penyelesaian konflik ini sebenarnya bisa menjadi kunci juga untuk menghadapi problem global dewasa ini, yaitu krisis ekonomi global yang diawali krisis finansial di Amerika Serikat.Terhentinya konflik akan mengarah pada produktivitas penduduk dunia untuk meningkatkan kesejahteraan masing- masing. Wallahu a'lam Bishshawab. (Sindo)

**IV. LAIN-LAIN : T i d a k**  
**Ada**  
**V. EDITORIAL :**

#### **1. Memperbaiki Sistem Akuntansi dan Sistem Hukum**

Dalam peringatan hari ulang tahun ke-62 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (12/1) siang, Ketua BPK Prof Dr Anwar Nasution mengungkapkan bahwa kelemahan sistem akuntansi dan sistem hukum membuat Indonesia menjadi salah satu negara terkorup di dunia. "Akibat dari ulah kita sendiri, kehidupan rakyat menjadi sengsara dan Indonesia dianggap sebagai 'the sick man of Asia'," ujar Anwar Nasution.

Selama periode 2003-2008 dalam rangka penyelamatan keuangan negara, BPK telah melaporkan 210 kasus hasil pemeriksaannya kepada penegak hukum dengan nilai Rp 30,18 triliun dan US\$ 470 juta.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan negara merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila tidak dilakukan, Indonesia dipastikan kembali pada krisis tahun 1997-1998. Untuk itu, cita-cita penegakan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel masih memerlukan perjuangan panjang, demikian Ketua BPK.

Kita boleh berbeda pendapat menanggapi tugas, fungsi dan tanggung jawab BPK, terutama dengan paparan Anwar Nasution di atas, karena apa yang dicapai BPK tersebut dengan mengungkap 210 kasus selama lima tahun ini, tentu merupakan kelemahan dari instansi atau lembaga lain.

**Jakarta, 14 Januari 2009**  
**Sub Direktorat Berita**  
**Direktorat Informasi dan Media**  
**Deplu**